



RENCANA KERJA

INSPEKTORAT
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Semarang,

2023

INSPEKTUR
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. DIONEWIDIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731015 199703 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II HASIL EVALUASI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022.....	6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH.....	6
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH.....	22
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH.....	23
2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	28
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	34
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	34
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH.....	35
3.2 MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH.....	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH.....	39
BAB V PENUTUP.....	119

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.... 1
- Gambar 1.2 Integrasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah .2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah s/d Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah.....	9
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	22
Tabel 2.3 Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tupoksi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	24
Tabel 2.4 Tabel Analisis Peluang dan Tantangan	25
Tabel 2.5 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	29
Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	32
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	36
Tabel 3.2 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	37
Tabel 4.1 Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024...	39

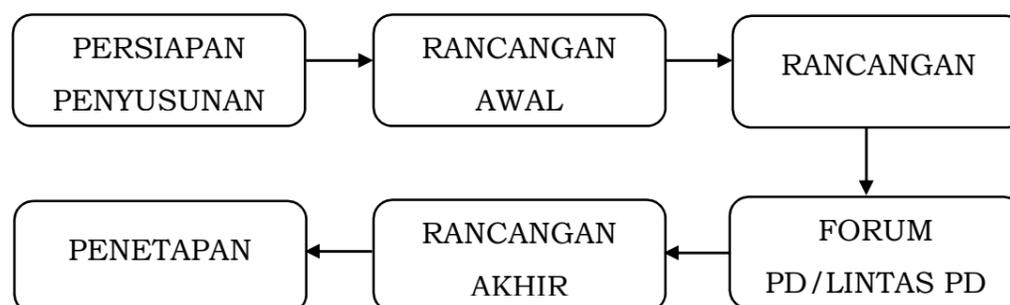
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

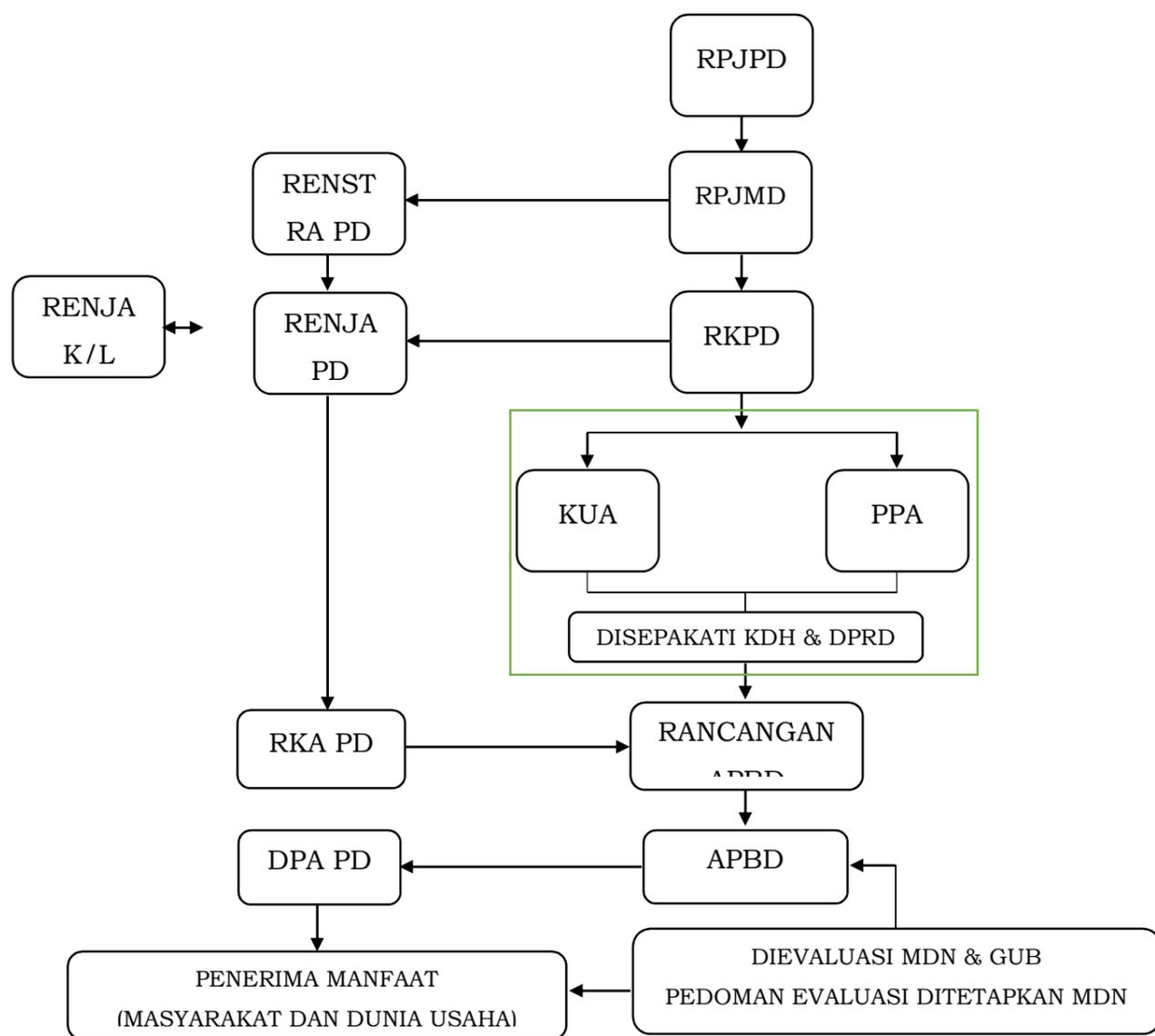
Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Dalam rangka penyusunan Renja, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan. Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan dengan pembentukan tim penyusunan Renja;
2. Penyusunan rancangan awal berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD;
4. Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD; dan
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, hasil evaluasi Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun lalu (2022), dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2023). Berpedoman pada Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah juga mempertimbangkan Renja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi pembina, untuk memastikan bahwa fokus pengawasan Inspektorat Jawa Tengah telah sejalan dengan perencanaan pengawasan nasional.



Gambar 1.2 Integrasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah

RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD yang kemudian dijabarkan ke dalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD. RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD. Keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan Renstra PD. Seluruh program selama tiga tahun mempedomani program prioritas dalam RPJMD. RPJMD dilaksanakan melalui RKPD. Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) ke dalam kegiatan prioritas. RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum ruang lingkup tugas maupun untuk penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 disusun dengan tujuan :

- a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2024 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022;
- b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 pada tahun pertama periode Tahun 2024.
- c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 LATAR BELAKANG
 - 1.2 LANDASAN HUKUM
 - 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
 - 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
- BAB II HASIL EVALUASI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022
 - 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
 - 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
 - 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
 - 2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
 - 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
 - 3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
 - 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
- BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Tugas Pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Tujuan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah terwujudnya penguatan peran pengawasan intern dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sedangkan untuk sasaran strategisnya yaitu:

1. Tercapainya Level 3 Penuh Kapabilitas APIP, dengan Indikator Kinerja Kapabilitas APIP level 3 pada elemen Peran dan Layanan, Praktik Profesional, serta Struktur dan Tata Kelola;
2. Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP, dengan Indikator Kinerja Maturitas SPIP Nilai 3,5 pada unsur :
 - a) Lingkungan Pengendalian
 - b) Penilaian Risiko
 - c) Kegiatan Pengendalian
 - d) Informasi dan Komunikasi
 - e) Pemantauan dan Pengendalian Intern.

Anggaran yang dikelola Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 sebesar Rp 32.177.566.000,- dengan realisasi mencapai Rp 31.886.633.959,- atau 99,10%.

Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan antara lain sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
Kegiatan yang memenuhi target kinerja, yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen IHPS;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, dengan indikator program sebagai berikut:
 - a. Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi;
 - b. Persentase Penerapan MR di OPD.Kegiatan yang memenuhi target kinerja, antara lain:
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - 2) Pendampingan dan Asistensi, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a) Jumlah OPD yang dievaluasi RB;
 - b) Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli;
 - c) Persentase Pelaporan LHKPN;
 - d) Persentase Pelaporan LHKASN;
 - e) Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi;

- f) Jumlah Pendampingan MR ke OPD;
 - g) Jumlah Dokumen Surveillance ISO;
 - h) Jumlah Laporan pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator program sebagai berikut:
- a. Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD;
 - b. Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah.
- Kegiatan yang memenuhi target kinerja, antara lain:
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sedangkan Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan antara lain sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator program sebagai berikut:
- a. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah;
 - b. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Khusus;
 - c. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah;
 - d. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- Kegiatan yang melebihi target kinerja, antara lain:
- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan indikator kinerja:
 - a) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dihasilkan;

- b) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan;
 - c) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan.
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, dengan indikator kinerja:
- a) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan;
 - b) Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Dihasilkan.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan indikator program sebagai berikut:
- a. Nilai Self Assessment RB Provinsi;
 - b. Persentase Capaian Aksi Stranas PK;
 - c. Persentase Nilai MCP korsupgah.
- Kegiatan yang melebihi target kinerja yaitu Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.

Adapun faktor penyebab program terpenuhi/melebihi dari target yaitu adanya komitmen dari para Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah antara lain:

- 1. Dapat lebih mewujudkan peran APIP yang efektif baik dari sisi quality assurance maupun consulting partner;
- 2. Dapat lebih mewujudkan kondisi Sistem Pengendalian Intern di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Dapat menggambarkan seberapa puas pelanggan terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa pada aspek penguasaan materi pengawasan, aspek penyampaian komunikasi, aspek pelaksanaan standar audit, kode etik, dan aspek manfaat hasil pemeriksaan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk meningkatkan capaian program yaitu perlu meningkatkan aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra lebih detail dapat diketahui dalam Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah s/d Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6.01	INSPEKTORAT DAERAH									
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	%	85	85	107,87	126,91	85	85	100

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	
		Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Khusus	%	85	85	112,5	132,35	85	85	100
		Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	%	85	85	127,27	149,73	85	85	100
		Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan	%	85	85	122,78	144,45	85	85	100

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	
		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah								
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	85	85	127,06	149,48	85	85	100
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dihasilkan	Laporan	108	54	62	114,81	54	54	100

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Laporan	44	22	28	127,27	22	22	100
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan	Laporan	158	79	97	122,78	79	79	100
		Jumlah Dokumen IHPS	Dokumen	4	2	2	100	2	2	100

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan	Laporan	24	12	13	108,33	12	12	100
		Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Dihasilkan	Laporan	48	24	27	112,50	24	24	100

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Self Assessment RB Provinsi	Nilai	85	85	88,35	103,94	85	85	100
		Persentase Capaian Aksi Stranas PK	%	75	75	84,20	112,27	75	75	100
		Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Nilai MCP korsupgah	%	85	85	94,02	110,61	85	85	100

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	
		Persentase Penerapan MR di OPD	%	10	10	10	100	10	10	100
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Laporan	2	1	1	100	2	2	100
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD yang dievaluasi RB	OPD	82	41	41	100	41	41	100

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	
		Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli	Laporan	2	1	1	100	1	1	100
		Persentase Pelaporan LHKPN	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pelaporan LHKASN	%	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi	Laporan	8	4	4	100	4	4	100
		Jumlah Pendampingan MR ke OPD	OPD	9	4	4	100	4	4	100

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	
		Jumlah Dokumen Surveillance ISO	Dokumen	2	1	1	100	1	1	100
		Jumlah Laporan pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan	Laporan	2	1	1	100	1	1	100
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Ketercapain Administrasi	%	100	100	100	100	100	100	100

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	
		Pelayanan Perangkat Daerah								
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	55	11	11	100	11	11	100
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	2	1	1	100	1	1	100

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	1	1	100	1	1	100
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	6	3	3	100	3	3	100
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan	Laporan	8	4	4	100	4	4	100

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	4	2	2	100	2	2	100
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	8	4	4	100	4	4	100

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	6	3	3	100	3	3	100

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Capaian kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Capaian kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dapat diketahui dari Tabel berikut:

Tabel 2. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Capaian Tahun 2023	Catatan Analisis
				2022	2023			
1	Level 3 Penuh Kapabilitas APIP	-		3 Penuh	3 Penuh	3 Penuh	3 Penuh	Realisasi Tahun 2022 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri BPKP Perwakilan Jawa Tengah No. PE.09.03/LHP-768/PW11/6/2022, tanggal 30 November 2022
2	Nilai 3,19 Maturitas SPIP	-		3,18	3,19	3,165	3,19	Realisasi Tahun 2022 berdasarkan LHP Cepat Maturitas Terintegritas Nomor: HM.02.00/LHP-958/PW11/3.1/2022 tanggal 26 Desember 2022
3	Nilai Kepuasan Masyarakat	-		87,30	87,30	86,21	87,30	Realisasi Tahun 2022 berdasarkan Dokumen Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 2022
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		87	87	85,13	87	Realisasi Tahun 2022 berdasarkan LHESAKIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Adanya interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks sehingga dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Dalam perkembangannya, pengaturan Inspektorat Daerah belum mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Terkait hal tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menyusun perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat mengakomodir perubahan-perubahan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya; dan

i. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

j.

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Jawa Tengah. Adapun permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tupoksi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tupoksi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p>Tugas: membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.</p> <p>Fungsi: 1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri; 4. penyusunan laporan hasil pengawasan;</p>	<p>1. Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah perlu ditingkatkan; 2. Tingkat kedewasaan (maturitas) pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Jateng perlu ditingkatkan.</p>	<p>Faktor Penghambat: 1. Kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan; 2. Penerapan Manajemen Risiko belum dijalankan dengan maksimal; 3. Budaya integritas belum terinternalisasi secara baik.</p> <p>Faktor Pendorong: 1. Komitmen dan dukungan dari jajaran pimpinan; 2. Sinergitas dari seluruh <i>stakeholder</i> dalam mencapai target yang ditetapkan.</p>

5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 7. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya; dan 9. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.		
--	--	--

Selain permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tupoksi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, terdapat pula peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan daerah, dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tabel Analisis Peluang dan Tantangan

Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
1. Komitmen unsurpimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik; 2. Terbitnya aturan/regulasi yang berkaitan dengan penguatan peran Inspektorat; 3. Penerapan E-Audit dalam proses pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik; 4. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan bahwa : a. Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk	1. Harapan dari <i>stakeholders</i> bahwa APIP dapat berperan sebagai <i>assurance provider</i> sampai menjadi <i>strategic partner</i> ; 2. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal; 3. Tuntutan penguatan peran Inspektorat Sebagai <i>consulting partner</i> bagi SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 4. Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan melalui

Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
<p>melakukan pengawasan yang berindikasi penyalahgunaan wewenang/kerugian tanpa menunggu penugasan Kepala Daerah;</p> <p>b. pemberhentian atau mutasi inspektur Daerah provinsi dan inspektur pembantu Daerah provinsi harus terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Menteri;</p> <p>5. Perubahan SOTK baru dalam Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang semula berbasis kewilayahan menjadi spesialisasi penugasan;</p> <p>6. Adanya kebijakan penerimaan pegawai baru/CPNS untuk formasi Auditor dan PPUPD;</p> <p>7. Keberadaan mitra seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, serta BPKP dalam kegiatan pengawasan di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>8. Adanya penugasan dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengenai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta Zona Integritas yang didukung oleh mitra/ <i>stakeholder</i> terkait;</p> <p>9. Adanya penugasan <i>mandatory</i> dari Pemerintah Pusat dalam bidang pengawasan dan pencegahan korupsi;</p> <p>10. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;</p>	<p>Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis;</p> <p>5. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.</p>

Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
11. Terbitnya Nota Kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara RI tentang Koordinasi APIP dan APH dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemda yang berlaku selama lima tahun yaitu tahun 2023-2028.	

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Jawa Tengah. Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat yaitu:

- a. Perlunya dukungan *stakeholder* terkait terhadap peran Inspektorat dalam upaya mempertahankan opini WTP Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Masih lemahnya SPIP di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang *good governance*;
- d. Pergeseran peran APIP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Perkembangan peran APIP dimulai dari peran yang masih bersifat *watchdog* bergeser menjadi APIP telah berperan sebagai “*Trusted Advisor*” dimana apabila terjadi permasalahan maka Kepala Daerah akan mencari APIP untuk mendapatkan solusi dan peran terakhir yaitu “*Strategic Partner*” yang pada akhirnya APIP dapat memberikan masukan mengenai strategi pemerintah daerah.

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama dari Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2024-2026.

Tabel 2.5
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jawa Tengah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	85%	3.700.000	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jawa Tengah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	85%	3.700.000
		Jawa Tengah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	85%	3.700.000		Jawa Tengah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	85%	3.700.000
		Jawa Tengah	Persentase Tindak Lanjut Hasil	85%	3.700.000		Jawa Tengah	Persentase Tindak Lanjut Hasil	85%	3.700.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
			Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah					Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah		
		Jawa Tengah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	85%	3.700.000		Jawa Tengah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	85%	3.700.000
		Jawa Tengah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri	83%	1.000.000		Jawa Tengah	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri	83%	1.000.000
2	Program Perumusan Kebijakan,	Jawa Tengah	Persentase OPD yang mendapat MRI level 3	10,20%	4.100.000	Program Perumusan Kebijakan,	Jawa Tengah	Persentase OPD yang mendapat MRI level 3	10,20%	4.100.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
	Pendampingan Dan Asistensi					Pendampingan Dan Asistensi				
		Jawa Tengah	Persentase OPD yang mendapat IEPK level 3	10,20%	4.100.000		Jawa Tengah	Persentase OPD yang mendapat IEPK level 3	10,20%	4.100.000
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jawa Tengah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	800.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jawa Tengah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100%	800.000
		Jawa Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	50.200.000		Jawa Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100%	50.200.000

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.23/0002965 tanggal 17 Februari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 dan Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah wajib melaksanakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah bersama pemangku kepentingan. Forum Penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2023 dan memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan				
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jawa Tengah	Persentase Pemantauan Hasil Pemeriksaan	100%	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diharapkan tidak melakukan perannya sebagai <i>watchdog</i> , akan tetapi sebagai <i>consulting partner</i> dan <i>quality assurance</i> → DPRD
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi				
	Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Jawa Tengah	Jumlah Desa di Kab/Kota se Jawa Tengah	8 Desa	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diharapkan melakukan pendampingan implementasi desa anti korupsi di Kab/Kota se Provinsi Jawa Tengah → KPK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Jawa Tengah	Jumlah OPD Provinsi Jateng	49 OPD	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diharapkan melakukan Pendampingan SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko pada OPD tingkat Provinsi Jawa Tengah → BPKP

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025 tersebut, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui Sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartaba, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam mencapai sasaran pembangunan dan visi misi Presiden maka ditetapkan 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, Presiden telah memberikan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 tersebut, yaitu:

1. Pembangunan SDM;

2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi;
5. Transformasi Ekonomi.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi Presiden melalui misi ke-8 “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” yang dijabarkan dengan agenda pembangunan ke-7 “Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”. Inspektorat juga dapat berperan dalam penyederhanaan birokrasi sesuai dengan lima arahan Presiden untuk mencapai Visi Indonesia 2045 “Indonesia Maju”.

Implementasi misi ke-delapan dengan agenda prioritas pembangunan nasional ke-tujuh dan arahan Presiden ke-empat tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 ke-lima, yaitu: Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang terkait dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada:

1. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan perkuatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan Perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN
2. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya-upaya *clean and clear government* dan menerapkan “keperantaraan dan *enterpreuneur*” dalam tata kelola pemerintahan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Tujuan utama Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang hendak dicapai pada tahun 2024 adalah “**Meningkatkan Kualitas Pengawasan yang Terintegrasi**”. Sesuai dengan tujuan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Peran Pengawasan Internal; dan

2. Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemda.

Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Capaian
Meningkatkan Kualitas Pengawasan yang Terintegrasi		Indeks SPIP Terintegrasi	Level	3
	Meningkatnya Peran Pengawasan Internal	Level Kapabilitas APIP	Level	3
	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemda	Nilai MRI Pemerintah Daerah	Level	3
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	76
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,60
	Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Nilai MRI Perangkat Daerah	Nilai	3,00

3.2 MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, penetapan risiko prioritas dan penyusunan rencana tindak pengendalian. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dilakukan pada konteks strategis perangkat daerah yang hasilnya sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan								
Meningkatkan Kualitas Pengawasan yang Terintegrasi	Indeks SPIP Terintegrasi	Terjadinya korupsi dan fraud di Lingkungan Pemda	5	Belum efektifnya kegiatan pencegahan korupsi dan fraud di Lingkungan Pemda	Menurunnya reputasi Pemda	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Pencegahan Korupsi 	Inspektur	2024
Sasaran								

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemda	Nilai MRI Perangkat Daerah	Penyelenggaraan MR masih sekedar pemenuhan dokumen	16	Kurangnya komitmen pemilik risiko dalam menerapkan MR	Entitas tidak dapat memitigasi risiko yang dimiliki	Pemantauan penyelenggaraan MR	Inspektur	2024
Meningkatnya Peran Pengawasan Internal	Level Kapabilitas APIP	Pemangku kepentingan tidak memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat guna perbaikan berkelanjutan	15	<ul style="list-style-type: none"> Audit Kinerja belum bisa menyimpulkan 3E (efektif, efisien dan ekonomis) Belum semua pemeriksa memahami audit kinerja berbasis risiko dengan fokus 3E 	Organisasi tidak mampu memenuhi tujuannya dan mencapai hasil yang diinginkan	Arahan Inspektur kepada pemeriksa untuk melaksanakan audit kinerja berbasis risiko dengan fokus 3E	Inspektur	2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Tabel 4.1
Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah													29.717.953.000	INSPEKTORAT	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	76		INSPEKTORAT	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah											29.612.953.000		
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	83,6	29.612.953.000	INSPEKTORAT	

				X.XX. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								29.612.9 53.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	29.612.9 53.000	SEKRETARIAT	
				X.XX. 01.1. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							23.955.5 57.000		
							Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun				Dokumen	1	23.955.5 57.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
				X.XX. 01.1. 02.00 01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				23.955.5 57.000		
									Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	138	23.955.5 57.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENG AH --> KOTA SEMARANG	

				X.XX. 01.1. 02.00 02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-		
										Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokume n	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTR ASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provin si ; JAWA TENG AH --> KOTA SEMA RANG
				X.XX. 01.1. 02.00 03					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD				-		
										Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifi kasi keuangan perangkat daerah	Dokume n	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTR ASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provin si ; JAWA TENG AH --> KOTA SEMA RANG
				X.XX. 01.1. 02.00 05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-		
										Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTR ASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provin si ; JAWA TENG AH --> KOTA SEMA RANG
				X.XX. 01.1. 02.00 07					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				-		

									Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	Laporan	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
			X.XX.01.1.02.0008					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				-			
									Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG	
			X.XX.01.1.03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					200.500.000			
							Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			Dokumen	1	200.500.000		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	

				X.XX. 01.1. 03.00 01					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				-		
										Jumlah dokumen rencana barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokume n	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTR ASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provin si ; JAWA TENG AH --> KOTA SEMA RANG
				X.XX. 01.1. 03.00 02					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				200.500. 000		
										Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokume n	1	200.500. 000	SUB BAGIAN ADMINISTR ASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provin si ; JAWA TENG AH --> KOTA SEMA RANG
				X.XX. 01.1. 03.00 06					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-		
										Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTR ASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provin si ; JAWA TENG AH --> KOTA SEMA RANG
				X.XX. 01.1. 03.00 07					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				-		
										Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada	Dokume n	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTR ASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provin si ; JAWA TENG AH -->

										perangkat daerah						KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					618.290.000			
								Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan			%	100	618.290.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN		
				X.XX.01.1.05.0002				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					-			
									Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi		
				X.XX.01.1.05.0003				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					40.000.000			
									Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi		
				X.XX.01.1.05.0005				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					-			

									Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				X.XX.01.1.05.0009					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			578.290.000		
									Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	578.290.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
				X.XX.01.1.05.0010					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-		
									Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				X.XX.01.1.05.0011					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		
									Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah					533.933.000		

								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	533.933.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
				X.XX.01.1.06.0001				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					-		
									Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	0	-		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.0002				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					-		
									Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0	-		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.0003				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					-		
									Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0	-		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.0004				Penyediaan Bahan Logistik Kantor					-		
									Jumlah paket bahan logistik	Paket	0	-		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi

										kantor yang disediakan				ASI UMUM DAN KEUANGAN	
				X.XX.01.1.06.0005						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			-		
										Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.0006						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.000.000		
										Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.0008						Fasilitasi Kunjungan Tamu			195.000.000		
										Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	195.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.0009						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			327.033.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	327.033.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.0010						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			-		

									Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Dokumen	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.0011					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			6.900.000		
									Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	6.900.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				X.XX.01.1.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				187.900.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		Unit	3	187.900.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
				X.XX.01.1.07.0001				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		

									Jumlah unit kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				X.XX. 01.1. 07.00 02					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		
									Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				X.XX. 01.1. 07.00 03					Pengadaan Alat Besar			-		
									Jumlah unit alat besar yang disediakan	Unit	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				X.XX. 01.1. 07.00 04					Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			-		
									Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan	Unit	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				X.XX. 01.1. 07.00 05					Pengadaan Mebel			-		
									Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				X.XX. 01.1.					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			89.900.000		

				07.00 06												
										umlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	2	89.900.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi	
				X.XX. 01.1. 07.00 07					Pengadaan Aset Tetap Lainnya			-				
										Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi	
				X.XX. 01.1. 07.00 08					Pengadaan Aset Tak Berwujud			98.000.000				
										Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1	98.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi	
				X.XX. 01.1. 07.00 09					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-				
										Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi	
				X.XX. 01.1. 07.00 10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-				

									Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				X.XX.01.1.07.0011				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		
									Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				X.XX.01.1.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.732.020.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun		Laporan	4	2.732.020.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
				X.XX.01.1.08.0001				Penyediaan Jasa Surat Menyurat				230.000.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	230.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi

				X.XX. 01.1. 08.00 02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				667.600.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	667.600.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				X.XX. 01.1. 08.00 03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	30.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				X.XX. 01.1. 08.00 04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.804.420.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.804.420.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				X.XX. 01.1. 09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.384.753.000		
										Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	70	1.384.753.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	

								yang dilakuka n pemeliha raan										
				X.XX. 01.1. 09.00 01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.800.0 00					
										Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	11	39.800.0 00		SUB BAGIAN ADMINISTR ASI UMUM DAN KEUANGAN		OPD Provin si	
				X.XX. 01.1. 09.00 02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				369.038. 000					
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	23	369.038. 000		SUB BAGIAN ADMINISTR ASI UMUM DAN KEUANGAN		OPD Provin si	
				X.XX. 01.1. 09.00 03					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				-					
										Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	0	-		SUB BAGIAN ADMINISTR ASI UMUM		OPD Provin si	

															DAN KEUANGAN	
				X.XX. 01.1. 09.00 04					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				-			
									Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	0	-		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi	
				X.XX. 01.1. 09.00 05					Pemeliharaan Mebel			20.000.000				
									Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	20	20.000.000		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi	
				X.XX. 01.1. 09.00 06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			120.000.000				
									Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	120.000.000		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi	
				X.XX. 01.1. 09.00 07					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			-				
									Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0	-		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi	

				X.XX. 01.1. 09.00 08					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				80.000.0 00		
										Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	80.000.0 00	SUB BAGIAN ADMINISTR ASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provin si
				X.XX. 01.1. 09.00 09					Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				605.915. 000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direh abilitasi	Unit	1	605.915. 000	SUB BAGIAN ADMINISTR ASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provin si
				X.XX. 01.1. 09.00 10					Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000. 000		
										Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direh abilitasi	Unit	2	150.000. 000	SUB BAGIAN ADMINISTR ASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provin si
				X.XX. 01.1. 09.00 11					Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		
										Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direh abilitasi	Unit	0	-	SUB BAGIAN ADMINISTR ASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provin si

								perundan gan						
				X.XX. 01.1. 01.00 01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			60.000.0 00		
									Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokume n	6	60.000.0 00	SUB BAGIAN PERENCAN AAN	OPD Provin si ; JAWA TENGAH
				X.XX. 01.1. 01.00 07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45.000.0 00		
									Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	45.000.0 00	SUB BAGIAN PERENCAN AAN	OPD Provin si ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi												8.839.94 9.000		
	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi										Level	3		
		Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah										2.766.22 2.000		

		ah Daerah												
			Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah							Level	3	2.766.22 2.000	INSPEKTOR AT	
				6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDINGINAN DAN ASISTENSI							2.766.22 2.000		
						Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) level 3				%	10,2	1.686.74 5.000	SEKRETARIAT	
				6.01.03.1.02			Pendampingan dan Asistensi					1.686.74 5.000		
								Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka Pencegahan dan Pembera		Laporan	4	1.686.74 5.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	

								ntasan Korupsi											
				6.01. 03.1. 02.00 03					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1.686.74 5.000						
										Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiata n	4	1.686.74 5.000	SUB BAGIAN ADMINISTR ASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provin si ; JAWA TENGAH				
						Persentas e perangka t daerah yang mendapa t manajem en risiko indeks (MRI) level 3						%	10, 2	1.079.47 7.000	SEKRETARI AT				
				6.01. 03.1. 01					Perumus an Kebijaka n Teknis di Bidang Pengawas an dan Fasilitasi Pengawas an										
														198.940. 000					

							Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Kegiatan	1	198.940.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
			6.01.03.1.01.0001					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				198.940.000	
								Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Dokumen	1	198.940.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
			6.01.03.1.02			Pendampingan dan Asistensi						880.537.000	
							Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi		Laporan	5	880.537.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
			6.01.03.1.02.0002					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				880.537.000	
								Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	OPD	49	880.537.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

				6.01. 02.1. 01.00 07				Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil				579.243. 000		
									Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokume n	70	579.243. 000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	OPD Provin si ; JAWA TENGAH
						Persentas e tindak lanjut hasil pemeriks aan (TLHP) pengawas an akuntabil itas keuangan daerah				%	85	1.474.40 0.000	INSPEKTOR AT	
				6.01. 02.1. 01			Penyelen ggaraan Pengawas an Internal					1.474.40 0.000		
							Persentas e Laporan Hasil Pengawas an Akuntabil itas Keuanga n Daerah			%	100	1.474.40 0.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWAS AN AKUNTABIL ITAS KEUANGAN DAERAH	
				6.01. 02.1. 01.00 02				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				1.126.40 0.000		

									Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	42	1.126.400.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				6.01.02.1.01.0004				Reviu Laporan Keuangan				348.000.000		
									Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	20	348.000.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu				%	85	1.279.300.000	INSPEKTOR AT	
				6.01.02.1.02			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					1.279.300.000		
								Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		%	100	1.279.300.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	

				6.01. 02.1. 02.00 01					Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				200.000. 000		
									Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Laporan	4	200.000. 000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWAS AN KHUSUS	OPD Provin si ; JAWA TENGAH	
				6.01. 02.1. 02.00 02					Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				1.079.30 0.000		
									Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	20	1.079.30 0.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWAS AN KHUSUS	OPD Provin si ; JAWA TENGAH	
						Persentas e tindak lanjut hasil pemeriks aan (TLHP) pengawas an kinerja perangka t daerah				%	85	1.420.91 4.000	INSPEKTOR AT		
				6.01. 02.1. 01			Penyelen ggaraan Pengawas an Internal						1.420.91 4.000		
							Persentas e Laporan Hasil Pengawas an Kinerja Perangka t Daerah			%	100	1.420.91 4.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWAS AN KINERJA PERANGKA T DAERAH		
				6.01. 02.1. 01.00 01					Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1.420.91 4.000		

									Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	50	1.420.914.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah				%	85	1.319.870.000	INSPEKTOR AT	
				6.01.02.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1.319.870.000		
							Persentase Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			%	100	1.319.870.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
				6.01.02.1.01.003				Reviu Laporan Kinerja				484.250.000		
									Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	60	484.250.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

														HAN DAERAH	
				6.01. 02.1. 01.00 05					Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				835.620. 000		
									Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	30	835.620. 000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWAS AN PENYELEN GGARAAN PEMERINTA HAN DAERAH	OPD Provin si ; JAWA TENGAH	
JUMLAH												38.557.9 02.000			

Tabel 4.2

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Program/Kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Tidak optimalnya pemeliharaan rutin/ berkala gedung/kantor	20	Keterbatasan anggaran	Tidak semua kerusakan dapat diperbaiki pada tahun berjalan Perengkapan gedung/kantor tidak dapat berfungsi secara optimal	melakukan identifikasi kembali dan membuat skala prioritas pengajuan anggran	Sekretaris	2024
				Kerusakan gedung kantor yang tidak dapat diprediksi sehingga tidak masuk dalam	Mengganggu pelaksanaan tugas pegawai	melakukan identifikasi kembali dan membuat skala prioritas		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
				rencana anggaran		pengajuan anggran		
Program Penyelenggaraan Pengawasan								
Kegiatan Pengawasan Internal / Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Rekomendasi atau saran kurang tepat	12	kurangnya kompetennya Pemeriksa	Tidak dapat memberikan perbaikan untuk Laporan Kinerja	melakukan pemetaan jumlah pemeriksa yang belum diikutkan diklat	Irbawil I, II, III, dan Irbansus	2024
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rekomendasi hasil pemeriksaan belum dapat mencapai tujuan secara optimal	12	Bukti dukung temuan kurang memadai	Auditor salah dalam memberikan rekomendasi	membuat jadwal sosialisasi tambahan untuk pemeriksa yang	Irbawil I, II, III, dan Irbansus	2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
						berhalangan hadir		
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Minimnya prosentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF	12	Obrik kurang aktif dalam menyerahkan dokumen pendukung TLHP	Target penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak tercapai	melakukan komunikasi secara intensif dengan obrik melalui surat resmi dan media komunikasi elektronik	Sekretaris	2024
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan tidak Obyektif	10	Independensi (benturan kepentingan), Ancaman, dan Tekanan Eksternal	Hasil pemeriksaan tidak memberikan manfaat pada Entitas untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan	Pakta Integritas pada seluruh Auditor Inspektorat	Irbanwil I, II, III, dan Irbansus	2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
					atau dasar pengambilan tindakan korektif			
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pemeriksaan tidak dapat mendeteksi kelemahan pencapaian Ekonomis, Efisien, Efektif	10	Program Kerja Pemeriksaan (PKP), Daftar Materi Pemeriksaan (DMP) dan Langkah Kerja (LK) belum sepenuhnya mendukung pemeriksaan 3E Ekonomis, Efisien, Efektif	Hasil pemeriksaan kurang memberikan manfaat pada Entitas untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan atau dasar pengambilan tindakan korektif	Penyusunan PKP, DMP dan LK berdasarkan Pedoman tentang pemeriksaan kinerja sehingga mendukung pemeriksaan 3E Ekonomis, Efisien, Efektif	Irbanwil I, II, III, dan Irbansus	2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
		Munculnya Tuntunan Hukum atas Hasil Pengawasan	10	Ketidakpuasan atas Hasil Pengawasan	Tuntutan Hukum kepada APIP	menyusun SOP tentang Pengelolaan arsip dokumen pemeriksaan (KKP, DMP, LK, SPT, BA Entry, BA Eit/Klarifikasi NHP) satu pintu pada sub bagian Adum (Urusan Arsip)	Irbanwil I, II, III, dan Irbansus	2024

BAB V

PENUTUP

Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang berisi penjabaran tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan merupakan pedoman Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan di lingkup Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh stakeholder terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh SKPD pada pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota, Aparat Penegak Hukum, serta seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, Renja ini juga menjadi acuan dalam upaya pengawasan yang pada akhirnya dapat mewujudkan penguatan pengawasan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ketersediaan anggaran menjadi hal yang penting agar penguatan pengawasan dan perubahan peran Inspektorat menjadi *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* dapat terlaksana secara optimal.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk *proving* (membuktikan) kinerja dan untuk *improving* (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Tabel 1
Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
													Uraian	Pihak yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sasaran Program						Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Ijèn Kemendagri			Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	Risiko Kepatuhan	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu untuk penyusunan kebijakan dan berhubungan dengan pihak ke 3	Perbaiki sistem pada Obyek Pemeriksaan terlambat	Obyek Pemeriksaan dan Pemda
								Penyelenggaraan Pengawasan Internal						
	Sasaran Kegiatan								Jumlah Dokumen Ihtisar hasil Pemeriksaan Semesteran	Keterlambatan pembuatan dokumen IHPS	Risiko Operasional	Data dukung yang kurang memadai	Terlambatnya informasi hasil pemeriksaan	Inspektorat Prov. Jateng dan OPD
										Manipulasi data tindak lanjut	Risiko Fraud	Pemberian imbalan untuk penyelesaian tindak lanjut	Terdapat kerugian yang tidak dikembalikan	Inspektorat Prov. Jateng dan OPD
	Sasaran Program						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah			Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	Risiko Kepatuhan	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu untuk penyusunan kebijakan dan berhubungan dengan pihak ke 3	Perbaiki sistem pada Obyek Pemeriksaan terlambat	Obyek Pemeriksaan dan Pemda
								Penyelenggaraan Pengawasan Internal						
	Sasaran Kegiatan								Persentase Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Terbitnya Laporan Hasil Reviu (LHR) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak tepat waktu	Risiko Operasional	Penyerahan LKPD dari Penyusun LKPD kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terlambat.	Keterlambatan penyerahan Reviu LKPD Provinsi Jawa Tengah dan LKPD Provinsi Jawa Tengah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga performa Inspektorat dinilai tidak profesional	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
										Manipulasi hasil pengawasan	Risiko Fraud	Gratifikasi	Terdapat kerugian daerah yang tidak dikembalikan	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
	Sasaran Program						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu			Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	Risiko Kepatuhan	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu untuk penyusunan kebijakan dan berhubungan dengan pihak ke 3	Perbaiki sistem pada Obyek Pemeriksaan terlambat	Obyek Pemeriksaan dan Pemda
								Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						
	Sasaran Kegiatan								Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlambatnya proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan audit tujuan tertentu	Risiko Operasional	Ketidakpatuhan Obyek Pemeriksaan dalam diperiksa dan kesulitan dalam data dukung	Proses pemeriksaan tidak dapat sesuai target waktu	Inspektorat Prov. Jateng
										Manipulasi hasil pengawasan	Risiko Fraud	Gratifikasi	Terdapat kerugian daerah yang tidak dikembalikan	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
	Sasaran Program						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah			Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	Risiko Kepatuhan	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu untuk penyusunan kebijakan dan berhubungan dengan pihak ke 3	Perbaiki sistem pada Obyek Pemeriksaan terlambat	Obyek Pemeriksaan dan Pemda
								Penyelenggaraan Pengawasan Internal						
	Sasaran Kegiatan								Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Terlambatnya terbitnya laporan hasil pengawasan kinerja Perangkat Daerah	Risiko Operasional	Kurangnya data atau informasi dari Obyek Pemeriksaan	Obyek Pemeriksaan belum dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan OPD
										Manipulasi hasil pengawasan	Risiko Fraud	Gratifikasi	Terdapat kerugian daerah yang tidak dikembalikan	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
	Sasaran Program						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah			Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	Risiko Kepatuhan	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu untuk penyusunan kebijakan dan berhubungan dengan pihak ke 3	Perbaiki sistem pada Obyek Pemeriksaan terlambat	Obyek Pemeriksaan dan Pemda
								Penyelenggaraan Pengawasan Internal						
	Sasaran Kegiatan								Persentase Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penerbitan Laporan Hasil Reviu (LHR) Rancangan Akhir LPPD terlambat	Risiko Operasional	- Surat permintaan untuk reviu dari Biro Pemoldaker (LPPD) terlambat di kirim ke Inspektorat Prov. Jateng - Data yang di berikan belum memadai	Evaluasi LPPD tidak sesuai jadwal	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
										Terjadi mark up hasil evaluasi	Risiko Fraud	Gratifikasi	Penurunan reputasi organisasi	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2
Analisis Risiko

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Sasaran Strategis										
1	Terjadinya korupsi dan fraud di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	2	5	10	Ada	- Pergub tentang <i>Fraud Control Plan</i> - Sosialisasi Pencegahan Korupsi	Memadai	1	5	5
2	Penyelenggaraan MR masih sekedar pemenuhan dokumen	4	4	16	Ada	Pemantauan penyelenggaraan MR	Memadai	2	3	6
3	Pemangku kepentingan tidak memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat guna perbaikan berkelanjutan	3	5	15	Ada	Arahkan Inspektur kepada pemeriksa untuk melaksanakan audit kinerja berbasis risiko dengan fokus 3E	Memadai	2	4	8
Sasaran Program										
1	Pegawai memberikan pelayanan yang tidak sesuai SOP	1	5	5	Ada	Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan	Memadai	1	5	5
2	Penyajian data kinerja tidak dapat dipertanggungjawabkan	1	5	5	Ada	Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan	Memadai	1	5	5
3	Kegiatan pencegahan, deteksi, dan penanganan risiko fraud dan korupsi di Perangkat Daerah tidak berjalan	2	5	10	Ada	Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan evaluasi melalui Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	Memadai	2	5	10
4	Pengelolaan manajemen risiko di Perangkat Daerah tidak berjalan	2	5	10	Ada	Sosialisasi Manajemen Risiko dan evaluasi melalui Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	Memadai	1	5	5
5	Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	2	5	10	Ada	Monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan	Memadai	1	5	5
6	Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	2	5	10	Ada	Monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan	Memadai	1	5	5
7	Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	2	5	10	Ada	Monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan	Memadai	1	5	5
8	Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	2	5	10	Ada	Monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan	Memadai	1	5	5
9	Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	2	5	10	Ada	Monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan	Memadai	1	5	5
Sasaran Kegiatan										
1	Selisih perhitungan gaji pegawai	1	5	5	Ada	Rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan	Memadai	1	5	5
2	Penunggakan premi asuransi barang milik daerah	1	5	5	Ada	Pencatatan dan perhitungan anggaran asuransi barang milik daerah	Memadai	1	5	5
3	Tertundanya pelaksanaan Bimtek/PKS	2	5	10	Ada	Pemberitahuan jadwal pelaksanaan Bimtek/PKS 1 bulan sebelumnya	Memadai	1	4	4
4	Pertanggungjawaban belanja fiktif	1	5	5	Ada	Penggunaan Routing Slip	Memadai	1	5	5
5	Peralatan/ perlengkapan yang diadakan tidak tepat manfaat	2	5	10	Ada	Pencermatan kebutuhan dan verifikasi RAB	Memadai	1	4	4
6	Surat hilang dan tidak terlacak	2	5	10	Ada	Penggunaan Sistem Integrasi Surat Masuk dan Disposisi	Memadai	1	4	4
7	Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dinas	1	5	5	Ada	Penerbitan arsip terkait pajak kendaraan	Memadai	1	4	4
8	Terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	2	5	10	Ada	Pengumpulan data untuk perencanaan dan evaluasi secara periodik	Memadai	1	3	3
9	Wajib Laporan LHKAN tidak melaporkan LHKAN	2	5	10	Ada	Pendampingan dan monitoring Inspektorat kepada Wajib Laporan	Memadai	1	3	3
10	Pelaksanaan kegiatan saber pungi hanya dilakukan oleh satu pihak	4	3	12	Ada	Rapat koordinasi tim Saber Pungi	Memadai	2	2	4
11	Program Kerja Pengawasan Tahunan tidak berbasis risiko	4	4	16	Ada	Pengumpulan data isu-isu daerah, pengumpulan <i>risik register</i> OPD	Memadai	2	4	8
12	Evaluasi reformasi birokrasi dijalankan tanpa paduan resmi	4	4	16	Ada	Rapat penyusunan juknis evaluasi RB	Memadai	3	3	9
13	Tidak dilakukan pendokumentasian, pemantauan, dan pengukuran perkembangan/progres penyelenggaraan SPIP	4	3	12	Ada	Membuat nota dinas terkait monitoring SPIP	Memadai	3	3	9
14	Terjadi mark up nilai evaluasi RB dan SPIP Terintegrasi	1	5	5	Ada	Pengarahan oleh Pimpinan dan penambahan klausul tidak menerima gratifikasi pada SPT	Memadai	1	5	5
15	Keterlambatan pembuatan dokumen IHPS	1	5	5	Ada	Rapat internal Subbag Anev	Memadai	1	5	5
16	Manipulasi data tindak lanjut	1	5	5	Ada	Monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan	Memadai	1	5	5

Tabel 2
Analisis Risiko

No	Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17	Terbitnya Laporan Hasil Reviu (LHR) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak tepat waktu	2	5	10	Ada	Rapat Koordinasi dengan BPKAD Prov. Jateng	Memadai	1	4	4
18	Manipulasi hasil pengawasan	1	5	5	Ada	Pengarahan dan pengawasan oleh Pimpinan, <i>peer review</i>	Memadai	1	5	5
19	Terlambatnya proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan audit tujuan tertentu	2	5	10	Ada	Melakukan wawancara dengan pengadu dan melakukan pemeriksaan sesuai prosedur	Memadai	1	4	4
20	Manipulasi hasil pengawasan	1	5	5	Ada	Pengarahan dan pengawasan oleh Pimpinan, <i>peer review</i>	Memadai	1	5	5
21	Terlambatnya terbitnya laporan hasil pengawasan kinerja Perangkat Daerah	2	5	10	Ada	Pengarahan sebelum penugasan dan <i>peer review</i> setelah pemeriksaan	Memadai	1	4	4
22	Manipulasi hasil pengawasan	1	5	5	Ada	Pengarahan dan pengawasan oleh Pimpinan, <i>peer review</i>	Memadai	1	5	5
23	Penerbitan Laporan Hasil Reviu (LHR) Rancangan Akhir LPPD terlambat	2	5	10	Ada	Rapat Koordinasi dengan Biro Perencanaan Setda Prov. Jateng	Memadai	1	4	4
24	Terjadi mark up hasil evaluasi	1	5	5	Ada	Pengarahan dan pengawasan oleh Pimpinan, <i>peer review</i>	Memadai	1	5	5

Tabel 3
Penetapan Risiko Prioritas

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sasaran Strategis					
1	Terjadinya korupsi dan fraud di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	10	Pemerintah Daerah	Belum efektifnya kegiatan pencegahan korupsi dan fraud di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Menurunnya reputasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
2	Penyelenggaraan MR masih sekedar pemenuhan dokumen	16	Pemerintah Daerah	Kurangnya komitmen pemilik risiko dalam menerapkan MR	Entitas tidak dapat memiligi risiko yang dimiliki
3	Pemangku kepentingan tidak memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat guna perbaikan berkelanjutan	15	Pemerintah Daerah	• Audit Kinerja belum bisa menyimpulkan 3E (efektif, efisien dan ekonomis) • Belum semua pemeriksa memahami audit kinerja berbasis risiko dengan fokus 3E	Organisasi tidak mampu memenuhi tujuannya dan mencapai hasil yang diinginkan
Sasaran Program					
1	Pegawai memberikan pelayanan yang tidak sesuai SOP	5	Inspektur	Pegawai menerima imbalan dalam proses pelayanan	Kepuasan masyarakat atas pelayanan organisasi menurun
2	Kegiatan pencegahan, deteksi, dan penanganan risiko fraud dan korupsi di Perangkat Daerah tidak berjalan	10	Inspektur	Kurangnya komitmen dalam upaya pencegahan korupsi	Penilaian akan kegiatan Kegiatan pencegahan, deteksi, dan penanganan risiko fraud dan korupsi di Perangkat Daerah rendah
3	Pengelolaan manajemen risiko di Perangkat Daerah tidak berjalan	10	Inspektur	Obyek Pemeriksaan belum menjalankan proses manajemen risiko sesuai dengan peraturan	Penilaian Pengelolaan manajemen risiko di Perangkat Daerah rendah
4	Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	10	Irbansus	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu untuk penyusunan kebijakan dan berhubungan dengan pihak ke 3	Perbaikan sistem pada Obyek Pemeriksaan terlambat
5	Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	10	Irbansus	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu untuk penyusunan kebijakan dan berhubungan dengan pihak ke 3	Perbaikan sistem pada Obyek Pemeriksaan terlambat
6	Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	10	Irbansus	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu untuk penyusunan kebijakan dan berhubungan dengan pihak ke 3	Perbaikan sistem pada Obyek Pemeriksaan terlambat
7	Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	10	Irbansus	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu untuk penyusunan kebijakan dan berhubungan dengan pihak ke 3	Perbaikan sistem pada Obyek Pemeriksaan terlambat
8	Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	10	Sekretaris	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu untuk penyusunan kebijakan dan berhubungan dengan pihak ke 3	Perbaikan sistem pada Obyek Pemeriksaan terlambat
9	Penyajian data kinerja tidak dapat dipertanggungjawabkan	5	Inspektur	Kurang validnya data dukung kinerja	Tidak terukurnya capaian kinerja
Sasaran Kegiatan					
1	Terjadi mark up nilai evaluasi RB dan SPIP Terintegrasi	5	Kasubbag Perencanaan dan Kasubbag Anev	Gratifikasi	Penurunan reputasi organisasi
2	Manipulasi data tindak lanjut	5	Kasubbag Anev	Pemberian imbalan untuk penyelesaian tindak lanjut	Terdapat kerugian yang tidak dikembalikan
3	Manipulasi hasil pengawasan	5	Irbansus	Gratifikasi	Terdapat kerugian daerah yang tidak dikembalikan
4	Manipulasi hasil pengawasan	5	Irbansus	Gratifikasi	Terdapat kerugian daerah yang tidak dikembalikan
5	Manipulasi hasil pengawasan	5	Irbansus	Gratifikasi	Terdapat kerugian daerah yang tidak dikembalikan
6	Terjadi mark up hasil evaluasi	5	Irbansus	Gratifikasi	Penurunan reputasi organisasi
7	Program Kerja Pengawasan Tahunan tidak berbasis risiko	16	Kasubbag Perencanaan	Kurang data dukung terkait peta risiko	Pengawasan dilakukan tanpa didasarkan pada risiko
8	Evaluasi reformasi birokrasi dijalankan tanpa paduan resmi	16	Kasubbag Anev	Perubahan aturan terkait Evaluasi Reformasi Birokrasi	Terjadi perbedaan persepsi antara evaluator dan obyek pemeriksaan terhadap Evaluasi RB
9	Pelaksanaan kegiatan saber pungli hanya dilakukan oleh satu pihak	12	Kasubbag Adumkeu	Terjadi ketidaksiharian pihak-pihak untuk melaksanakan kegiatan saber pungli	Terjadinya kesenjangan peran dalam kegiatan Saber Pungli
10	Tidak dilakukannya pendokumentasian, pemantauan, dan pengukuran perkembangan/progres penyelenggaraan SPIP	12	Kasubbag Perencanaan	Kurang komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan SPIP	Rendahnya kualitas penerapan SPIP di lingkungan perangkat daerah
11	Tertundanya pelaksanaan Bimtek/PKS	10	Kasubbag Adumkeu	Penentuan Jadwal dan Peserta yang berbenturan dengan jadwal penugasan	Tidak terpenuhinya target peserta
12	Peralatan/perengkapan yang diadakan tidak tepat manfaat	10	Kasubbag Adumkeu	Perencanaan kebutuhan yang tidak tepat	Penggunaan peralatan/perengkapan tidak optimal
13	Surat hilang dan tidak terlacak	10	Kasubbag Adumkeu	Surat tidak didokumentasikan dalam sistem	Informasi dalam surat tidak tersampaikan pada pihak yang dituju
14	Terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	10	Kasubbag Perencanaan dan Kasubbag Anev	Keterbatasan sumber daya	Tidak dapat dijalankan kegiatan dan evaluasi dengan baik
15	Wajib Laporan LHKAN tidak melaporkan LHKAN	10	Kasubbag Adumkeu	Kurangnya komitmen dari Wajib Laporan	Capaian pelaporan LHKAN tidak sesuai dengan target 100%
16	Terbitnya Laporan Hasil Reviu (LHR) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak tepat waktu	10	Irbansus	Penyerahan LKPD dan Penyusun LKPD kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terlambat.	Keterlambatan penyerahan Reviu LKPD Provinsi Jawa Tengah dan LKPD Provinsi Jawa Tengah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga performa Inspektorat dinilai tidak profesional
17	Terlambatnya proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan audit tujuan tertentu	10	Irbansus	Ketidapatannya Obyek Pemeriksaan dalam diperiksa dan kesulitan dalam data dukung pemeriksaan	Proses pemeriksaan tidak dapat sesuai target waktu
18	Terlambatnya terbitnya laporan hasil pengawasan kinerja Perangkat Daerah	10	Irbansus	Kurangnya data atau informasi dari Obyek Pemeriksaan	Obyek Pemeriksaan belum dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan
19	Penerbitan Laporan Hasil Reviu (LHR) Rancangan Akhir LPPD terlambat	10	Irbansus	- Surat permintaan untuk reviu dari Biro Pemotdaker (LPPD) terlambat di kirim ke Inspektorat Prov. Jateng - Data yang di berikan belum memadai	Evaluasi LPPD tidak sesuai jadwal
20	Selisih perhitungan gaji pegawai	5	Kasubbag Adumkeu	Ketidakteitlian administrasi	Kurang bayar gaji pegawai
21	Penunggaan premi asuransi barang milik daerah	5	Kasubbag Adumkeu	Kurang terbitnya administrasi	Tidak semua semua barang milik daerah dapat terpenuhi asuransi
22	Pertanggungjawaban belanja fiktif	5	Kasubbag Adumkeu	Adanya pembayaran kebutuhan yang tidak terdapat di dokumen pelaksanaan anggaran	Anggaran makan minum yang ada tidak dapat mencukupi kebutuhan
23	Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dinas	5	Kasubbag Adumkeu	Kurang terbitnya administrasi	Terdapat biaya tambahan untuk denda pajak

24	Keterlambatan pembuatan dokumen IHPS	5	Kasubbag Anev	Data dukung yang kurang memadai	Terlambatnya informasi hasil pemeriksaan
----	--------------------------------------	---	---------------	---------------------------------	--

Tabel 4
Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah														
	Sasaran Strategis		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)													
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah												
	Sasaran Strategis				Indeks Kepuasan Masyarakat											
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
	Sasaran Program						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah			Pegawai memberikan pelayanan yang tidak sesuai SOP	5	Pegawai menerima imbalan dalam proses pelayanan	Kepuasan masyarakat atas pelayanan organisasi menurun	Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan	Sekretaris	2024
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Sasaran Kegiatan								Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Selish perhitungan gaji pegawai	5	Ketidaktepatan administrasi	Kurang bayar gaji pegawai	Rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan	Kasubbag Adumkeu	2024
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	Sasaran Kegiatan								Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Penunggakan premi asuransi barang milik daerah	5	Kurang tertibnya administrasi	Tidak semua barang milik daerah dapat terpenuhi asuransi	Pencatatan dan perhitungan anggaran asuransi barang milik daerah	Kasubbag Adumkeu	2024
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Sasaran Kegiatan								Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Tertundanya pelaksanaan Bimtek/PKS	10	Penentuan Jadwal dan Peserta yang berbenturan dengan jadwal penugasan	Tidak terpenuhinya target peserta	Pemberitahuan jadwal pelaksanaan Bimtek/PKS 1 bulan sebelumnya	Kasubbag Adumkeu	2024
								Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Sasaran Kegiatan								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Pertanggungjawaban belanja fiktif	5	Adanya pembayaran kebutuhan yang tidak terdapat di dokumen pelaksanaan anggaran	Anggaran yang ada tidak dapat mencukupi kebutuhan	Penggunaan Routing Slip	Kasubbag Adumkeu	2024
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Sasaran Kegiatan								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Peralatan/ perlengkapan yang diadakan tidak tepat manfaat	10	Perencanaan kebutuhan yang tidak tepat	Penggunaan peralatan/perlengkapan tidak optimal	Pencermatan kebutuhan dan verifikasi RAB	Kasubbag Adumkeu	2024
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Sasaran Kegiatan								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Surat hilang dan tidak terlacak	10	Surat tidak didokumentasikan dalam sistem	Informasi dalam surat tidak tersampaikan pada pihak yang dituju	Penggunaan Sistem Integrasi Surat Masuk dan Disposisi	Kasubbag Adumkeu	2024
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Sasaran Kegiatan								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dinas	5	Kurang tertibnya administrasi	Terdapat biaya tambahan untuk denda pajak	Penertiban arsip terkait pajak kendaraan	Kasubbag Adumkeu	2024
									Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah							
	Sasaran Strategis				Indeks Manajemen Risiko											
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
	Sasaran Program						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah			Penyajian data kinerja tidak dapat dipertanggungjawabkan	5	Kurang validnya data dukung kinerja	Tidak terukurinya capaian kinerja	Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan	Sekretaris	2024

							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
Sasaran Kegiatan							Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	10	Keterbatasan sumber daya	Tidak dapat dijalankan kegiatan dan evaluasi dengan baik	Pengumpulan data untuk perencanaan dan evaluasi secara periodik	Kasubbag Adumkeu	2024		
Sasaran Strategis								Terjadinya korupsi dan fraud di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah		Belum efektifnya kegiatan pencegahan korupsi dan fraud di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Menurunnya reputasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah					
Sasaran Strategis								Penyelenggaraan MR masih sekedar pemenuhan dokumen		Kurangnya komitmen pemilik risiko dalam menerapkan MR	Entitas tidak dapat memitigasi risiko yang dimiliki					
Sasaran Program								Kegiatan pencegahan, deteksi, dan penanganan risiko fraud dan korupsi di Perangkat Daerah tidak berjalan	10	Kurangnya komitmen dalam upaya pencegahan korupsi	Penilaian akan kegiatan Kegiatan pencegahan, deteksi, dan penanganan risiko fraud dan korupsi di Perangkat Daerah rendah	Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan evaluasi melalui Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	Sekretaris	2024		
Sasaran Kegiatan								Wajib Laporan LHKAN tidak melaporkan LHKAN	10	Kurangnya komitmen dari Wajib Laporan	Capaian pelaporan LHKAN tidak sesuai dengan target 100%	Pendampingan dan monitoring Inspektorat kepada Wajib Laporan	Kasubbag Adumkeu	2024		
Sasaran Kegiatan								Pelaksanaan kegiatan saber pungli hanya dilakukan oleh satu pihak	12	Terjadi ketidakadilan pihak-pihak untuk melaksanakan kegiatan saber pungli	Terjadinya kesenjangan peran dalam kegiatan Saber Pungli	Rapat koordinasi tim Saber Pungli	Kasubbag Adumkeu	2024		
Sasaran Program								Pengelolaan manajemen risiko di Perangkat Daerah tidak berjalan	10	Obyek Pemeriksaan belum menjalankan proses manajemen risiko sesuai dengan peraturan	Penilaian Pengelolaan manajemen risiko di Perangkat Daerah rendah	Sosialisasi Manajemen Risiko dan evaluasi melalui Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	Sekretaris	2024		
Sasaran Kegiatan								Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	16	Kurang data dukung terkait peta risiko	Pengawasan dilakukan tanpa didasarkan pada risiko	Pengumpulan data isu-isu daerah, pengumpulan risk register OPD	Kasubbag Perencanaan	2024		
Sasaran Kegiatan								Evaluasi reformasi birokrasi dijalankan tanpa paduan resmi	16	Perubahan aturan terkait Evaluasi Reformasi Birokrasi	Terjadi perbedaan persepsi antara evaluator dan obyek pemeriksaan terhadap Evaluasi RB	Rapat penyusunan juknis evaluasi RB	Kasubbag Anevl	2024		
Sasaran Kegiatan								Tidak dilakukan pendokumentasian, pemantauan, dan pengukuran perkembangan/progres penyelenggaraan SPIP	12	Kurang komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan SPIP	Rendahnya kualitas penerapan SPIP di lingkungan perangkat daerah	Membuat nota dinas terkait monitoring SPIP	Kasubbag Perencanaan	2024		
Sasaran Kegiatan								Terjadi mark up nilai evaluasi RB dan SPIP Terintegrasi		Gratifikasi	Penurunan reputasi organisasi	Pengarahan oleh Pimpinan dan penambahan klausul tidak menerima gratifikasi pada SPT	Kasubbag Perencanaan	2024		
Sasaran Strategis								Pemangku kepentingan tidak memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat guna perbaikan berkelanjutan		* Audit Kinerja belum bisa menyimpulkan 3E (efektif, efisien dan ekonomis) * Belum semua pemeriksa memahami audit kinerja berbasis risiko dengan fokus 3E	Organisasi tidak mampu memenuhi tujuannya dan mencapai hasil yang diinginkan					
Sasaran Program								Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	10	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu untuk penyusunan kebijakan dan berhubungan dengan pihak ke 3	Perbaikan sistem pada Obyek Pemeriksaan terlambat	Monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan	Sekretaris dan Irbanwas	2024		
Sasaran Kegiatan								Jumlah Dokumen Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semesteran	5	Data dukung yang kurang memadai	Terlambatnya informasi hasil pemeriksaan	Rapat internal Subbag Anevl	Kasubbag Anevl	2024		

Sasaran Kegiatan									Manipulasi data tindak lanjut		Pemberian imbalan untuk penyelesaian tindak lanjut	Terdapat kerugian yang tidak dikembalikan	Monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan	Kasubbag Anev	2024
Sasaran Program						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah			Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	10	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu untuk penyusunan kebijakan dan berhubungan dengan pihak ke 3	Perbaikan sistem pada Obyek Pemeriksaan terlambat	Monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan	Sekretaris dan Irbanwas	2024
							Penyelenggaraan Pengawasan Internal								
Sasaran Kegiatan								Persentase Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Terbitnya Laporan Hasil Reviu (LHR) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak tepat waktu	5	Penyerahan LKPD dari Penyusun LKPD kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terlambat.	Keterlambatan penyerahan Reviu LKPD Provinsi Jawa Tengah dan LKPD Provinsi Jawa Tengah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga performa Inspektorat dinilai tidak profesional	Rapat Koordinasi dengan BPKAD Prov. Jateng	Irban AKD	2024
Sasaran Kegiatan									Manipulasi hasil pengawasan	5	Gratifikasi	Terdapat kerugian daerah yang tidak dikembalikan	Pengarahan oleh Pimpinan dan penambahan klausul tidak menerima gratifikasi pada SPT	Irban AKD	2024
Sasaran Program						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu			Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	10	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu untuk penyusunan kebijakan dan berhubungan dengan pihak ke 3	Perbaikan sistem pada Obyek Pemeriksaan terlambat	Monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan	Sekretaris dan Irbanwas	2024
							Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu								
Sasaran Kegiatan								Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlambatnya proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan audit tujuan tertentu	10	Ketidapatuhan Obyek Pemeriksaan dalam diperiksa dan kesulitan dalam data dukung	Proses pemeriksaan tidak dapat sesuai target waktu	Melakukan wawancara dengan pengadu dan melakukan pemeriksaan sesuai prosedur	Irbanwas	2024
Sasaran Kegiatan									Manipulasi hasil pengawasan	5	Gratifikasi	Terdapat kerugian daerah yang tidak dikembalikan	Pengarahan oleh Pimpinan dan penambahan klausul tidak menerima gratifikasi pada SPT	Irbanwas	2024
Sasaran Program						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah			Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	10	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu untuk penyusunan kebijakan dan berhubungan dengan pihak ke 3	Perbaikan sistem pada Obyek Pemeriksaan terlambat	Monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan	Sekretaris dan Irbanwas	2024
							Penyelenggaraan Pengawasan Internal								
Sasaran Kegiatan								Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Terlambatnya terbitnya laporan hasil pengawasan kinerja Perangkat Daerah	10	Kurangnya data atau informasi dari Obyek Pemeriksaan	Obyek Pemeriksaan belum dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan	Pengarahan sebelum penugasan dan peer review setelah pemeriksaan	Irban Kinerja PD	2024
Sasaran Kegiatan									Manipulasi hasil pengawasan	5	Gratifikasi	Terdapat kerugian daerah yang tidak dikembalikan	Pengarahan oleh Pimpinan dan penambahan klausul tidak menerima gratifikasi pada SPT	Irban Kinerja PD	2024
Sasaran Program						Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah			Proses tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan tidak selesai tepat waktu	10	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu untuk penyusunan kebijakan dan berhubungan dengan pihak ke 3	Perbaikan sistem pada Obyek Pemeriksaan terlambat	Monitoring dan pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan	Sekretaris dan Irbanwas	2024
							Penyelenggaraan Pengawasan Internal								
Sasaran Kegiatan								Persentase Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penerbitan Laporan Hasil Reviu (LHR) Rancangan Akhir LPPD terlambat	10	- Surat permintaan untuk reviu dari Biro Pemoldaker (LPPD) terlambat di kirim ke Inspektorat Prov. Jateng - Data yang di berikan belum memadai	Evaluasi LPPD tidak sesuai jadwal	Rapat Koordinasi dengan Biro Pemoldaker Setda Prov. Jateng	Irban PPD	2024
Sasaran Kegiatan									Terjadi mark up hasil evaluasi	5	Gratifikasi	Penurunan reputasi organisasi	Pengarahan oleh Pimpinan dan penambahan klausul tidak menerima gratifikasi pada SPT	Irban PPD	2024